

RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2024



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah - Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 dapat tersusun.

Penyusunan Renja Dispora Kota Blitar Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dispora Kota Blitar .

Sebagai suatu instrumen kebijakan Dinas, Renja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispora Kota Blitar di Tahun 2024, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024, besar harapannya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 2023
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAAHRAGA KOTA BLITAR



MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651225 198703 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

BAB I Pendahuluan 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud Dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD 8

 2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan 9

 2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan 9

 2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan 9

 2.1.4 Faktor Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 9

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 19

 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD 24

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29

 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 38

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 41

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41

 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD 43

 3.3 Program dan Kegiatan..... 47

BAB IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	52
BAB V	Penutup	63
5.1	Catatan Penting	63
5.2	Kaidah Pelaksanaan	63
5.3	Rencana Tindak Lanjut	64



DAFTAR TABEL

1. TABEL 2.1 : Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan 11

2. TABEL 2.2 : Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan 23

3. TABEL 2.3 : Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan 17

4 TABEL 2.4 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tribulan I Tahun 2023 31

5. TABEL 2.5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Blitar 39

6. TABEL 3.1 : Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Dan Prioritas PD Tahun 2024 43

7. TABEL 3.2 : Sasaran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 46

8. TABEL 4.1 : Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 55

9. TABEL 4.2 : Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dispora Kota Blitar Tahun 2022 pada Renja Dspora Kota Blitar Tahun 2024..... 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Dokumen RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada didalamnya, pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Pembangunan Daerah diperlukan dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang tahunan dan perencanaan jangka menengah.

Dengan bertujuan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.

Pasal 13 Ayat (2) Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan

tahapan dan tata cara, maka rancangan RENJA Perangkat Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025. Dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. tahun 2024 diarahkan pada tema “*Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Insfrastruktur yang Berkualitas derta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan*” guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pemerintah Kota Blitar menyusun RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dan melakukan Pemetaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan kondisi diatas, selanjutnya disusun Rancangan Awal RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, pendanaan dan penjabaran pedoman dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian yang ada lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju ;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;
3. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 ;
4. Penyusunan RENJA PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2023, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar karena akan memberikan *arah dalam pelaksanaan pembangunan* sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan

harus *dipedomani* oleh semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

1.1.1 Keterkaitan antara RENJA PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan RENJA salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup penelaahan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah. Ini artinya antara RENJA dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan RENJA berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal RENJA Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.

1.1.2 Keterkaitan antara RENJA PD dengan RENSTRA Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RENJA Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA). RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara Dokumen RENSTRA dengan Dokumen RENJA Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara RENJA PD dengan RENJA Kementerian / Lembaga dan RENJA Provinsi

RENJA Kementerian / Lembaga (RENJA Kementrian Pemuda Dan Olahraga) dan Renja Provinsi (RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan RENJA PD, seperti halnya RENSTRA maupun RKPD. Namun RENJA Kementrian Pemuda Dan Olahraga dan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Program Provinsi dan Pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024.

1.1.4 RENJA dan Tindak lanjutnya dalam APBD

RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024. Sedangkan RKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu RENJA merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 sebagaimana telah telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7) ;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4) ;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 48) ;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 54) ;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 ;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENJA Tahun 2024 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024. Disusunnya Rencana Kerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dimaksudkan untuk merumuskan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program - programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2024 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2024 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga terdapat informasi informasi yang akan memudahkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target target yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar tahun 2024. Sedangkan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah ;
2. Sebagai Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 ;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan ;
4. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	:	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN YANG LALU
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun yang lalu dan Capaian Renstra PD ;
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ;
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ;
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ;
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
		Memuat telaahan terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional ;

- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar
Memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai Perubahan RENSTRA perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAKT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2016 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Di Bidang Kepemudaan Dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD

Pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 (tahun N-2) dilakukan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan / program / kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Pelaksanaan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) Program antara lain :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
- 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung dengan anggaran sebesar Rp. 17.427.104.321,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), terdiri dari :

1. Belanja Operasi	:	Rp.	16.136.592.216,-
2. Belanja Modal	:	Rp.	1.290.512.105,-
J u m l a h	:	Rp.	12.211.646.859,-

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mengingat bahwa evaluasi ini dipergunakan untuk menyusun Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024, maka evaluasi yang dipergunakan adalah Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat daerah dan RNSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023.

Review hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan Realisasi RENSTRA tersebut mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat

Daerah dan / atau Realisasi APBD Kota Blitar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang *tidak memenuhi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang *telah memenuhi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang *melebihi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
- 4) Faktor-faktor penyebab *tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi* target kinerja program/kegiatan ;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD ;
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang *tidak memenuhi target* kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program / Kegiatan yang *tidak memenuhi target* kinerja hasil / keluaran yang direncanakan *NIHIL*.

2.1.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

I. Faktor tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan

1. Pergeseran anggaran tidak tepat waktu, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Kurang Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Kurang Teliti pada saat PAK yaitu pada saat anggaran digeser pada kegiatan yang lain, indikator kegiatan tidak dirubah / disesuaikan

II. Faktor tercapainya target kinerja program / kegiatan

1. Adanya perencanaan dan koordinasi yang baik.
2. Penetapan target yang tepat

2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program RENSTRA PD

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya kinerja Program / Kegiatan terhadap target capaian program Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja OPD tahun yang lalu mempunyai kinerja yang kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja untuk diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran ataupun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.

- 2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
- 3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan dapat tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
- 4. Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah direncanakan.

Evaluasi Pelaksanaan RENJA pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dan perkiraan capaian realisasi target RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diuraikan dalam *Tabel 2.2* berikut ini :



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN I 2023

Kode Program / Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023			
							Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan I tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7)		11 = (10/4)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.19.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA AN	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	90%	5.690.000.000			80%	1.413.847.081	73%	82.184.838	91,25%	5,81%	83%	1.355.799.200	73%	82.184.838	81%	1,44%
		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	7,18%				6,28%		1,21%		20,17%		6,58%		1,21%		16,8%	
2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengem bangan Pemuda & Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab / Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dab Kepeloporan Pemuda	6100 orang	4.840.000.000			1412 orang	1.324.436.478	70 orang	8.306.445	4,96%	0,63%	1425 orang	1.094.276.400	70 orang	8.306.445	1,14%	0,17%
2.19.02.2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 orang	382.000.000			70 orang	36.327.744	-	0	-	-	50 orang	18.917.200	-	0	-	-

2.19.02.2.01 04	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	480 orang	88.000.000			140 orang	1.022.693.883	70 orang	7.598.245	50%	0,74%	156 orang	904.493.600	70 orang	7.598.245	14,5%	8,6%
2.19.02.2.01 06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan & Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	4 Unit	400.000.000			1 unit	14.072.692	0,25 unit	708.200	25%	5,03%	-	0	0,25 unit	708.200	6,25%	0,17%
2.19.02.2.01 08	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan & Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kab / Kota dari Seluruh Kecamatan	4700 orang	1.170.000.000			1140 orang	251.342.159	-	0	-	-	1150 orang	170.865.600	-	0	-	-
2.19.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab / Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	80%	850.000.000			80%	89.410.603	-	73.878.393	-	82,63%	80%	261.522.800	-	73.878.393	-	8,6%
2.19.02.2.02 02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	6 dokumen	850.000.000			1 dokumen	89.410.603	0,7 dokumen	73.878.393	70%	82,63%	2 dokumen	261.522.800	0,7 dokumen	73.878.393	11,6%	8,6%

2.19.03	PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	100%	69.300.000.000	-	-	41%	8.234.857.012	32%	1.728.963.406	94%	21%	41%	6.688.601.200	32%	1.728.963.406	32%	2,5%
		Cakupan pelatih yang tersertifikasi	100%		-		69%		63%		-		70%		63%		63%	
		Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	100%		-		67%		56%		-		70%		56%		56%	
2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab / Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	23 Cabor	25.460.000.000			20 Cabor	2.433.895.139	19 Cabor	40.050.406	95%	1,65%	21 Cabor	455.570.100	19 Cabor	40.050.406	82,6%	0,15%
2.19.03.2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	39 Obyek	25.460.000.000			7 obyek	2.433.895.139	7 obyek	40.050.406	100%	1,65%	7 obyek	455.570.100	7 obyek	40.050.406	17,9%	0,15%
2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab / Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	16 Kejuaraan	2.675.000.000			4 Kejuaraan	280.201.420	-	0	-	-	4 Kejuaraan	548.380.400	4 Kejuaraan	280.201.420	25%	10,4%
2.19.03.2.02 02	Sub Kegiatan Penyelenggara an Kejuaraan & Pekan Olahraga Tingkat kab / kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	8 dokumen	1.475.000.000			2 dokumen	205.029.845	-	0	-	-	1 dokumen	247.079.400	2 dokumen	205.029.845	25%	13,9%
2.19.03.2.02 03	Sub Kegiatan Partisipasi & Keikutsertaan dalam Kegiatan Penyelenggara an Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	400 orang	1.200.000.000			25 orang	75.171.575	-	0	-	-	90 orang	301.301.000	25 orang	75.171.575	6,25%	6,2%
2.19.03.2.03	Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12 jenis	455.000.000			3 jenis	66.158.118	-	0	-	-	1 jenis	25.934.600	-	0	-	-

2.19.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	12 pelatda	455.000.000			3 pelatda	66.158.118	-	0	-	-	1 pelatda	25.934.600	-	0	-	-
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	37.850.000.000			100%	5.183.240.723	100%	1.678.413.000	100%	32,38%	100%	5.254.818.600	100%	1.678.413.000	100%	4,43%
2.19.03.2.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12 dokumen	37.370.000.000			3 dokumen	5.105.000.000	1 dokumen	1.678.413.000	33,3%	32,8%	3 dokumen	5.175.000.000	1 dokumen	1.678.413.000	8,3%	4,49%
2.19.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	12 organisasi	480.000.000			3 organisasi	78.240.723	-	0	-	-	3 organisasi	79.818.600	-	0	-	-
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	67%	2.860.000.000			33%	271.361.612	33%	10.500.000	100%	3,87%	50%	403.893.500	33%	10.500.000	49,2%	0,36%
2.19.03.2.05.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	16 dokumen	2.860.000.000			4 dokumen	271.361.612	0,4 dokumen	10.500.000	10%	3,87%	4 dokumen	403.893.500	0,4 dokumen	10.500.000	2,5%	0,36%
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif	100%	3.000.000.000	-	-	64%	528.585.295	64%	175.000.000	100%	33,11%	73%	398.331.500	64%	175.000.000	64%	5,8%
2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	100%	3.000.000.000			64%	528.585.295	64%	175.000.000	100%	33,11%	73%	398.331.500	64%	175.000.000	64%	5,8%
2.19.04.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	2.000.000.000			1 lembaga	350.000.000	1 lembaga	175.000.000	100%	50%	1 lembaga	350.000.000	1 lembaga	175.000.000	25%	8,75%

2.19.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	800 orang	200.000.000			50 orang	28.439.295	-	0	-	-	50 orang	48.331.500	-	0	-	-
2.19.04.2.01.07	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yg Terkelola dan Termanfaatkan	8 jenis	800.000.000			1 jenis	150.146.000	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Indeks	22.758.800.000	-	-	81 Indeks	5.167.486.096	-	913.988.019	-	17,69%	82 Indeks	13.960.370.725	-	913.988.019	-	4%
2.19.01.2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	100%	152.000.000	-	-	100%	28.109.807	34,47%	0	34,47%	-	100%	37.782.000	34,47%	0	34,47%	-
2.19.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 dokumen	6.000.000	-	-	11 dokumen	1.486.800	2,8 dokumen	0	25,45%	-	11 dokumen	1.000.000	2,8 dokumen	0	6,3%	-
2.19.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 dokumen	146.000.000			8 dokumen	26.623.007	3,75 dokumen	0	46,88%	-	8 dokumen	36.782.000	3,75 dokumen	0	11,7%	-
2.19.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	11.415.000.000			100%	2.737.224.201	31,98%	476.331.133	31,98%	17,4%	100%	2.824.092.615	31,98%	476.331.133	31,98%	4,17%
2.19.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 orang	11.400.000.000			22 orang	2.734.724.502	21 orang	476.331.133	95,45%	17,42%	22 orang	2.823.092.615	21 orang	476.331.133	23,8%	4,17%

2.19.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20 laporan	15.000.000			5 laporan	2.499.699	1,59 laporan	0	31,80%	-	5 laporan	1.000.000	1,59 laporan	0	7,95%	-
2.19.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	100%	480.000.000			100%	78.275.360	6,9%	11.125.000	6,9%	14,21%	100%	70.031.600	6,9%	11.125.000	6,9%	2,3%
2.19.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	210.000.000			4 Paket	39.450.000	1 paket	11.125.000	25&	28,2%	2 Paket	20.000.000	1 paket	11.125.000	55%	5,29%
2.19.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 orang	270.000.000			26 orang	38.825.360	-	0	-	-	22 orang	50.031.600	-	0	-	-
2.19.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	1.816.800.000			100%	466.274.855	26,81%	159.856.794	26,81%	34,28%	100%	414.271.200	26,81%	159.856.794	26,81%	8,7%
2.19.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	35.300.000			1 paket	8.739.683	-	0	-	-	1 paket	5.747.000	-	0	-	-
2.19.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	16 paket	410.000.000			4 paket	42.811.654	-	0	-	-	4 paket	27.503.100	-	0	-	-
2.19.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	20 paket	94.000.000			7 paket	106.863.148	5 paket	104.470.900	71,43%	97,76%	5 paket	57.501.500	5 paket	104.470.900	25%	111,1%
2.19.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	32 paket	330.000.000			8 paket	62.592.500	1 paket	9.594.500	12,5%	15,33%	8 paket	50.742.000	1 paket	9.594.500	3,1%	2,9%

2.19.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	174.000.000			1 paket	39.087.070	0,5 paket	19.485.000	50%	49,85%	1 paket	25.002.600	0,5 paket	19.485.000	12,5%	11,1%
2.19.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	96 dokumen	23.500.000			24 dokumen	5.400.000	6 dokumen	1.350.000	25%	25%	12 dokumen	2.700.000	6 dokumen	1.350.000	6,25%	5,7%
2.19.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96 laporan	750.000.000			24 laporan	200.780.800	6 laporan	24.956.394	25%	12,43%	24 laporan		6 laporan	24.956.394	6,25%	3,3%
2.19.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	970.000.000			100%	121.934.582	10%	0	10%	-	100%	27.293.400	10%	0	10%	-
2.19.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	21 unit	505.000.000			6 unit	121.934.582	0,60 unit	0	10%	-	4 unit	27.293.400	0,60 unit	0	2,8%	-
2.19.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100%	6.800.000.000			100%	1.597.492.801	25%	259.221.876	25%	16,23%	100%	1.535.599.135	25%	259.221.876	25%	3,81%
2.19.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	192 laporan	250.000.000			36 laporan	26.720.801	9 laporan	11.964.531	25%	44,78%	36 laporan	31.450.135	9 laporan	11.964.531	4,6%	4,78%
2.19.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	240 laporan	6.550.000.000			60 laporan	1.570.772.000	15 laporan	247.257.345	25%	15,74%	60 laporan	1.504.149.000	15 laporan	247.257.345	6,25%	3,7%

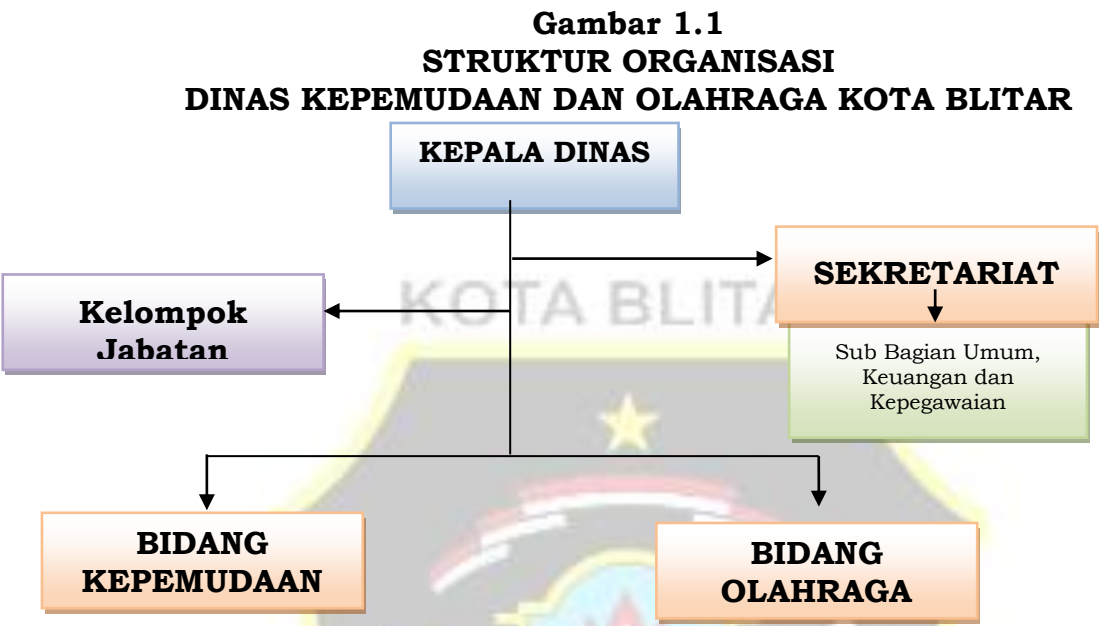
2.19.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100%	1.125.000.000			100%	138.174.492	5,5%	7.453.216	5,5%	5,39%	100%	96.351.700	5,5%	7.453.216	5,5%	0,66%
2.19.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	40 unit	515.000.000			13 unit	108.508.492	4 unit	7.453.216	30,7%	6,87%	13 unit	78.580.700	4 unit	7.453.216	10%	1,4%
2.19.01.2.09.06	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	192 unit	135.000.000			42 unit	29.666.000	-	-	-	-	42 unit	17.771.000	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2016 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi Kewenangan Daerah sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan perundang undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan ;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan ;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan ;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketata laksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas ;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
14. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
17. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
18. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kota Blitar memiliki Struktur Organisasi sebagaimana disajikan berikut ini :



Berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut :

1. Capaian tahun 2022 sebesar 100,05% berasal dari perhitungan realisasi Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan sebesar 50,56% dibagi dengan target sebesar 50,53%.
2. Faktor pendukung Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 - Jumlah anggota Pramuka mengalami peningkatan ;
 - Keaktifan OKP dalam berkegiatan sehingga menarik partisipasi pemuda
 - Fasilitasi Dana Hibah dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan OKP ;
 - Pemberian fasilitas Kantor Sekretariat untuk KNPI dan Pramuka ;
 - Banyaknya Kegiatan Tingkat Kota yang melibatkan peran pemuda.
3. Faktor penghambat Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan adalah sebagai berikut :
 - Restruktur pada OKP yang mengakibatkan penyesuaian anggota OKP dan Komunitas pemuda ;
 - Kurangnya Fasilitasi Kegiatan dari Pemerintah Daerah ;
 - Pemberian Dana Hibah tidak dapat diberikan setiap tahun karena tidak ada dasar hukum yang memayungi
4. Tindak lanjut Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan adalah sebagai berikut :

- Verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI ;
- Penguatan kelembagaan komunitas ;
- Penguatan peran KNPI.

2. Indikator Persentase Prestasi Olahraga

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut

1. Capaian tahun 2022 sebesar 98,4% berasal dari perhitungan realisasi Persentase Prestasi Olahraga sebesar 64% dibagi dengan target sebesar 65%.
2. Faktor pendukung Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut :
 - Fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk Organisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Disabilitas ;
 - Pemberian Reward bagi atlet dan pelatih olahraga yang berprestasi.
3. Faktor penghambat tidak tercapainya target Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga pada Tahun 2022 diantaranya adalah:
 - Tidak ada SOP tentang kriteria pengiriman atlet delegasi ;
 - Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi
 - Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 19 cabor dengan menyediakan tempat latihan tetap) ;
 - Minat Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Disabilitas masih kurang ;
 - Belum terbangunnya integrasi antara olahraga dengan mitra kerja pendidikan ;
 - Kurangnya peran pihak swasta dalam pembinaan atlet.
4. Tindak lanjut atas Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut :
 - Melakukan Pendampingan Konsultan Olahraga, Puslatkot dan Latihan Tanding ;
 - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah ;
 - Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas ;
 - Melakukan Sosialisasi secara masif ;
 - Memberikan reward kepada atlet yang berprestasi.

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian tahun 2022 sebesar 100,5% berasal dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 dibagi Target Tahun 2022.
2. Faktor pendukung Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - Mampu memahami Perencanaan Strategis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;
 - Mampu memahami manajemen kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar (melalui perencanaan, pelaporan dan evaluasi)
 - Mampu menyusun sistem pengukuran dan pelaporan kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;
 - Komitmen Pimpinan didalam manajemen kinerja bawahan ;
 - Koordinasi dan kerjasama yang baik antara staf dan pimpinan ;
 - Cascading kinerja telah tersusun pada tiap level.

3. Faktor Penghambat Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - Belum mampu membuat perencanaan strategis yang inovatif ;
 - Kompetensi ASN perlu ditingkatkan.
4. Tindak lanjut atas Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - Terobosan dalam hal penerapan SAKIP perlu dilakukan agar dapat melakukan eksekusi rencana strategis dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan sebuah sistem akuntabilitas kinerja yang berdampak terhadap masyarakat.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2022 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berikut disampaikan Pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam *Tabel 2.5* sebagai berikut :



TABEL. 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

No.	Indikator Kinerja Utama	SPP	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	18
1.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	-	-	50,53%	50,90%	51,35%	51,80%	50,08%	-	50,90%	51,35%	Sangat Berhasil
2.	Persentase Prestasi Olahraga	-	-	65%	72%	74%	77%	57%	-	72%	74%	Sangat Berhasil
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	A (84,19)	A (84,20)	A (84,21)	A (84,22)	A (84,64)	-	A (84,21)	A (84,22)	Sangat Berhasil

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dispora Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD bersangkutan, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Data pembandingan diperoleh dari Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan proses identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan Pelayanan Dispora Propinsi Jawa Timur berdasarkan Sasaran RENSTRA K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dispora Provinsi Jawa Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	- Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotism, budaya prestasi dan profesionalitas pemuda - Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang social, politik,ekonomi, budaya dan agama	1. Keterbatasan program tindak-lanjut bagi pengembangan pemuda terampil ; 2. Terbatasnya SDM dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran ; 3. Terbatasnya kuantitas kesadaran pemuda ; 4. Terbatasnya kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan ; 5. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan pemuda 6. Terbatasnya kesadaran tentang legalisasi organisasi ; 7. Terbatasnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan ; 8. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan organisassi kepemudaan	1. Belum optimalnya program tindak lanjut pemuda terampil ; 2. Kurangnya kualitas SDM dan sarana olahraga; 3. Kurangnya program pembinaan kesadaran pemuda ; 4. Kurangnya program kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan; 5. Kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda 6. Kurangnya kesadaran tentang legalitas organisasi; 7. Kurangnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan ; 8. Kurangnya kegiatan pemberdayaan organisasi	1. Peningkatan program kegiatan yang berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana olahraga ; 3. Meningkatkan program pembinaan kesadaran pemuda ; 4. Meningkatkan program kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan 5. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan pemuda ; 6. Meningkatkan program kegiatan kesadaran tentang legalisasi organisasi ; 7. Meningkatkan kegiatan penguatan organisasi kepemudaan ; 8. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dispora Provinsi Jawa Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kepemudaan	
2.	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	1. Terbatasnya SDM dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran ; 2. Terbatasnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK ; 3. Terbatasnya program pengembangan sentra olahraga pelajar ; 4. Terbatasnya kegiatan peningkatan kompetisi / festival olahraga ; 5. Terbatasnya pembibitan atlet potensial	1. Kurangnya kualitas SDM dan sarana olahraga ; 2. Kurangnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK 3. Kurang optimalnya pengembangan sentra olahraga pelajar ; 4. Kurang optimalnya kegiatan kompetisi / festival olahraga ; 5. Kurang optimalnya pembibitan atlet potensial	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana olahraga ; 2. Meningkatkan kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK ; 3. Meningkatkan pengembangan sentra olahraga pelajar ; 4. Meningkatkan kegiatan kompetisi / festival olahraga ; 5. Meningkatkan pembibitan atlet potensial

Ditinjau dari perencanaan pembangunan Kementerian / Lembaga, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat diperoleh sasaran pembangunannya adalah Pemuda Maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L tersebut kemudian dijadikan acuan untuk masukan dalam perumusan rencana pembangunan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Dengan memperhatikan analisa Renstra K/L, dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan yang direncanakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur agar tetap sejalan dengan pembangunan bidang Kepemudaan yang dilaksanakan K/L. Pembinaan pemuda sesuai Undang-Undang adalah melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. 3 (tiga) hal pokok dalam pembinaan pemuda tersebut menjadi dasar dalam merencanakan program kegiatan yang disusun oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk pembinaan pemuda.

Proses penyadaran dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda dan memberikan pembekalan agar pemuda mampu untuk mengambil sikap terhadap kondisi dilingkungan sekitar. Setelah melalui proses penyadaran, pemuda mendapatkan proses pemberdayaan untuk membangkitkan potensi yang dimiliki sehingga mampu berperan aktif dan terlibat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan potensi yang dimilikinya, pemuda memasuki fase berikutnya yaitu proses pengembangan, dimana kompetensi pemuda dilengkapi dengan

pengembangan jiwa keteladanan, jiwa kemandirian dan jiwa kepeloporan untuk menjadi pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Dibidang olahraga, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sasarannya untuk mewujudkan Atlet Elit Dunia. Atlet yang mampu membela kebanggaan bangsa dan negara di kompetisi tingkat internasional. Mempersiapkan atlet untuk memiliki prestasi tingkat dunia membutuhkan tahap-tahap yang saling terkait satu dengan yang lain. Tahapan pembinaan dan peningkatan prestasi ini dilakukan dengan program latihan yang berkesinambungan dari tingkat pemula, tingkat madya dan tingkat mahir. Peningkat prestasi atlet diawali dengan program pembibitan untuk menggali atlet potensial yang akan dibina melalui program pembinaan prestasi. Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan prestasi atlet dibutuhkan sentuhan IPTEK olahraga. IPTEK olahraga yang melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya pakar olahraga dan pelatih yang berkompeten.

Sebagai ajang untuk menguji prestasi hasil latihan diselenggarakan kompetisi multi event, baik ditingkat provinsi maupun nasional. Dalam proses pengukuran prestasi perlu adanya program tryout untuk mengukur prestasi atlet dievent internasional. Ukuran tersebut dijadikan pedoman untuk capaian terget prestasi atlet yang dipersiapkan selama proses latihan. Selain prestasi secara teknis, atlet perlu dibekali dengan persiapan mental. Pembentukan karakter atlet akan mewujudkan atlet yang berkelas dunia yang masih memiliki karakter dan budaya Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu - isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISPORA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas fungsi Dispora sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat kinerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar
 - 1) *Bidang Kepemudaan*, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kota Blitar belum dapat tertangani dengan optimal. Hal ini disebabkan :
 - Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luas cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 21 kelurahan ;
 - Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kelurahan ;
 - Fasilitasi peningkatan profesionalisme dan pembinaan kepeloporan bagi pemuda masih kurang ;
 - Implementasi Kota Layak Pemuda belum disusun secara cermat dan terperinci ;
 - Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktifitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan / kreatifitas pembinaan dalam ruang ;
 - Prestasi pemuda Kota Blitar masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat propinsi dan nasional
 - Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan baik formal melalui organisasi kepemudaan maupun non formal yaitu kelompok sosial masyarakat.

- 2) *Bidang Olahraga*
 - Penyelenggaraan keolahragaan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan baik penyelenggaraan / even olahraga tingkat propinsi maupun nasional ;
 - Kesadaran masyarakat tentang olahraga prestasi masih minim, sehingga diperlukan keaktifan Organisasi Olahraga untuk meningkatkan prestasi ;
 - Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Olahraga khususnya Sarana Prasarana Olahraga Khusus Difabel;
 - Rendahnya rasio gedung olahraga, juga diikuti oleh minimnya pembinaan olahraga sehingga berimbas pada minimnya prestasi olahraga di kalangan pemuda.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar
 - 1) Pengembangan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga terbentur dengan belum tersedianya beberapa dokumen pendukung (diantaranya Master Plan dan DED) di beberapa Fasilitas Olahraga.
 - 2) Keterbatasan kebijakan pelayanan pemuda di Kota Blitar karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dispora tetapi diampu oleh beberapa OPD terkait dalam kegiatan tertentu diantaranya :
 - a. Dinas Kesehatan dan Bakesbangpol menangani pembinaan pemuda pada kegiatan Pencegahan HIV AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika sementara di Dispora juga terdapat kegiatan Sosialisasi NAPZA
 - b. Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan dan perindustrian pada kegiatan kewirausahaan bagi pemuda
 - 3) Keterbatasan kebijakan mengenai pemberian hibah bagi masyarakat yang dalam hal ini berkaitan dengan pemberian hibah berupa alat olahraga dan alat ketrampilan bagi pemuda ;
 - 4) Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak jalanan dan kenakalan remaja ;
 - 5) Sumber daya manusia yang terbatas, yang sepenuhnya belum mampu untuk diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
 - 6) Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja ;
 - 7) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan ;
 - 8) Belum tersedianya data data Kepemudaan dan Keolahragaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ;
 - 9) Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan baik formal melalui organisasi kepemudaan maupun non formal yaitu kelompok sosial masyarakat.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional / internasional yaitu dengan Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan NAPZA bagi pemuda yang dilaksanakan selama 2x dengan mengundang perwakilan siswa SMA/SMK/MA di Kota Blitar
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar
 - a. Tantangan :
 - a) Tantangan Internal
 - Sebagian besar staf / pelaksana bukan merupakan praktisi olahraga / tidak mempunyai latar belakang keolahragaan sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan berkaitan dengan dunia olahraga ;
 - Belum / masih kurang gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi ;
 - Belum tersampaikan informasi program dan kegiatan Dispora kepada Kecamatan / kelurahan.
 - b) Tantangan Eksternal
 - Jumlah pemuda yang besar di Kota Blitar ;
 - Penanganan pemuda belum tertangani secara optimal ;
 - Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan perilaku destruktif ;
 - Masih kurangnya fasilitas olahraga indoor milik pemerintah dan swasta ;
 - Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga.
 - b. Peluang :
 - a) Luas wilayah Kota Blitar ;
 - b) Jumlah penduduk usia sekolah / pemuda ;
 - c) Adanya induk Organisasi Kepemudaan KNPI yang membawahi OKP OKP yang ada di Kota Blitar ;
 - d) Adanya Organisasi Olahraga KONI yang membina Cabor Cabor yang ada di Kota Blitar ;
 - e) Adanya Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana prasarana olahraga ;
 - f) Adanya Partisipasi masyarakat dan insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kota Blitar.
5. Formulasi isu isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untu ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu Strategis Daerah akan menggambarkan dinamika lingkungan eksternalbaik skala regional, nasional maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Blitar didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi

pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan dimasa yang akan datang.

Penelaahan faktor-faktor dari pelayanan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah di kota Blitar dimana permasalahan tersebut terurai di masyarakat sehingga dapat dirangkai menjadi Isu Strategis melalui peninjauan dari :

- a) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ;
- b) Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L ;
- c) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota ;
- d) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah ; dan
- e) Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pemuda dan olahraga menuju masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi pada tingkat perwujudannya diperlukan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesionalisme dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spriritual aparatur yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Renja PD telah menentukan 25 (Dua Puluh Lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan lokal ;
3. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan
4. Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan
5. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan;
6. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui Wajib Belajar 12 Tahun ;
8. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing Lulusan ;
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan ;
10. Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan ;
11. Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan ;
12. Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat ;
13. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata, Perdagangan dan jasa daerah
14. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat ;

15. Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitas Permodalan untuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal
16. Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan antar Program ;
17. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin ;
18. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
19. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat ;
20. Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan ;
21. Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan ;
22. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi ;
23. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif ;
24. Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup ;
25. Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

Dari 25 (Dua Puluh Lima) prioritas pembangunan dimaksud, pada Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar menjabarkan dalam 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas Pembangunan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RENJA tahun 2024 dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RENSTRA Dispora dan tingkat kinerja yang telah dicapai Dispora, dengan arahan Kepala Dinas terkait prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar disajikan sebagaimana dalam *Tabel 2.4* dibawah ini ;

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Indeks	5.005.435.250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Indeks	5.005.435.250	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	100%	37.782.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	100%	37.782.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	36.782.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	36.782.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	2.824.092.615	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	2.824.092.615	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	2.823.092.615	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	2.823.092.615	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 laporan	1.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	100%	70.031.600	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	100%	70.031.600	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	20.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	20.000.000	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	22 orang	50.031.600	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	22 orang	50.031.600	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	414.284.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	414.284.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.747.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.747.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	27.503.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	27.503.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 paket	57.501.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 paket	57.501.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	50.742.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	50.742.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	25.016.200	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	25.016.200	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.700.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	245.075.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	245.075.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	27.293.400	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	27.293.400	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4 unit	27.293.400	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4 unit	27.293.400	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100%	1.535.599.135	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100%	1.535.599.135	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	31.450.135	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	31.450.135	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	1.504.149.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	1.504.149.000	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100%	96.351.700	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100%	96.351.700	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	78.580.700	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	78.580.700	
	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	17.771.000	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	17.771.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	83%	1.428.667.200	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	83%	806.829.865	

RENCANA KERJA TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	6,58%				Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	6,58%		
1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota		Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	1356 orang	1.167.144.400	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota		Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	1356 orang	1.167.144.400	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 orang	18.917.200	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 orang	18.917.200	
	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	156 orang	977.361.600	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	156 orang	977.361.600	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan	1150 orang	170.865.600	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan	1140 orang	251.342.159	
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah		Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan	80%	261.522.800	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah		Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan	80%	261.522.800	

RENCANA KERJA TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota		an Organisasi Kepemudaan			Kabupaten/Kota		Organisasi Kepemudaan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 dokumen	261.522.800	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 dokumen	261.522.800	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase kelompok pramuka aktif	73%	398.331.500	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase kelompok pramuka aktif	73%	398.331.500	
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	73%	398.331.500	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	73%	398.331.500	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 orang	48.331.500	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 orang	48.331.500	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	350.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	350.000.000	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan pembinaan atlet muda	41%	6.688.601.200	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan pembinaan atlet muda	41%	6.688.601.200	
			Cakupan pelatih yang tersertifikasi	70%				Cakupan pelatih yang tersertifikasi	70%		
			Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	70%				Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	70%		
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	21 Cabor	447.620.100	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	21 Cabor	447.620.100	

RENCANA KERJA TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 obyek	447.620.100	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 obyek	447.620.100	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	3 kejuaraan	548.380.400	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	3 kejuaraan	548.380.400	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	2 dokumen	247.079.400	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	2 dokumen	247.079.400	
	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	90 orsng	301.301.000	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	90 orsng	301.301.000	
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 jenis	25.934.600	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 jenis	25.934.600	
	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	25.934.600	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	25.934.600	
4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	5.262.768.600	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	5.262.768.600	
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 dokumen	5.175.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 dokumen	5.175.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	3 organisasi	87.768.600	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	3 organisasi	87.768.600	
5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	50%	403.897.500	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	50%	403.897.500	

RENCANA KERJA TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 dokumen	403.897.500	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 dokumen	403.897.500	
	J U M L A H				13.521.035.150	J U M L A H				13.521.035.150	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar juga berasal dari Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat melalui Musrenbang yang selanjutnya menjadi pokok pikiran DPRD.

2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

- Usulan dari Kelurahan Gedog berkaitan dengan kurangnya Bantuan Operasional untuk Organisasi Olahraga Disabilitas (NPCI) maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Pembinaan Organisasi Olahraga Disabilitas (NPCI) pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan ;
- Usulan dari Kelurahan Bendo berkaitan dengan Kurangnya Perhatian Terhadap Olahraga Rekreasi dan Olahraga Permainan Tradisional Masyarakat Kota Blitar maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Pembinaan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Blitar pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan ;
- Usulan dari Kelurahan Kepanjenlor berkaitan dengan pencapaian prestasi olahraga prestasi yang maksimal maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Pembinaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan ;
- Usulan dari Kelurahan Bendogerit berkaitan dengan kurangnya bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang berdomisili di Kota Blitar maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar pada Sub Kegiatan Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan ;
- Usulan dari Kelurahan Pakunden berkaitan dengan kurangnya Bantuan Operasional untuk Menunjang Kegiatan Kantor Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Blitar Tahun 2024 maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Blitar pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah ;
- Usulan dari Kelurahan Sananwetan berkaitan dengan kurangnya Bantuan Operasional untuk DPD KNPI Kota Blitar maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk DPD KNPI Kota Blitar pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

2.5.2 Pokok – pokok pikiran DPRD

- Pada tahun 2024 *tidak ada usulan* yang bersumber dari Pokok – Pokok Pikiran DPRD.

Rumusan usulan program dan kegiatan yang diakomodir oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dimaksud dijabarkan dalam *Tabel 2.5* sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	PEKERJA	CATATAN
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
1.	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemudan Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab / Kota		Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda			
	Sub Kegiatan Pemenuh an Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasa rana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	1 Lembaga	Fasilitasi Pemberian Dana Hibah untuk Akademi Komunitas Negeri Putra Sang fajar	Usulan melalui musrenbang RKPD
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembang an Organisasi Kepemudaan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan berupa Dana Hibah untuk KNPI	Usulan melalui musrenbang RKPD
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN					
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina			
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 dokumen	Fasilitasi Pembinaan Atlit Olahraga Prestasi berupa Dana Hibah	Usulan melalui musrenbang RKPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	PEKERJA	CATATAN
					untuk KONI	
					Fasilitasi Pembinaan Atlit Olahraga Disabilitas berupa Dana Hibah untuk NPCI	
					Fasilitasi Pembinaan Atlit Olahraga Rekreasi berupa Dana Hibah untuk KORMI	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persentase Kelompok / Organisasi Pramuka yang dibina			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepramukaan berupa Dana Hibah untuk Pramuka	Usulan melalui musrenbang RKPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema Pembangunan Nasional pada Tahun 2024 adalah *Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* dengan 7 (tujuh) Program Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan ;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing ;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim ;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 memiliki pedoman 8 (delapan) Arah Kebijakan yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ;
3. Penguatan Daya Saing Usaha ;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan ;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi ;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas ;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Program Prioritas yang sesuai dengan tupoksi dari Dispora adalah Program 3.) *Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.*

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah *Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak* dengan Prioritas Daerah yaitu:

1. Pendidikan Berkualitas ;
2. Peningkatan Layanan Kesehatan ;
3. Percepatan Penurunan Kemiskinan ;
4. Penurunan Stunting dan Penyakit Lainnya ;
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar ;
6. Pengendalian Inflasi ;
7. Peningkatan Investasi ;
8. Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam
9. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Jujur, Adil, Damai dan Bermartabat

Sedangkan prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang adil, Sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong.

Yang berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Peningkatan Peran pemuda dan Pengembangan Olahraga dengan kebijakan yang diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama ;
- b. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran jasmani dalam upaya pembentukan watak bangsa ;
- c. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan.

Tahun 2024 adalah merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Dengan Penekanan pada Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, pada tahun 2024 diarahkan pada tema : *"Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan"*, guna mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tahun ini menekankan pada tidak hanya peningkatan tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup;
- 2) Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19;
- 3) Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis;
- 4) Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
- 5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan melalui penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan system dan kualitas data

- dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2. Penerapan perencanaan pembangunan melalui penganggaran yang berbasis kinerja ;
 3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan ;
 4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;
 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai ;
 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan layanan pada masyarakat ;
 7. Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan ;
 8. Memasyarakatkan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Profesional dan Berkualitas. *Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak*

Tabel 3.1
Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi dan
Prioritas PD Tahun 2024

Tema Pembangunan Nasional : Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		
Tema dan Prioritas Nasional	Tema dan Prioritas Pembangunan Propinsi	Tema dan Prioritas Kota Blitar
Tema Nasional Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tema Propinsi Peningkatan Sumberdaya dan Percepatan pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera unggul dan Berakhlak	Tema Kota Blitar Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan akan dilaksanakan oleh Dispora Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

I. TUJUAN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam kurun waktu 2021 – 2026 menetapkan tujuan yaitu *Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan* dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah dengan target 0,88% pada tahun 2024.
2. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dengan target 2,91% pada tahun 2024.

II. SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, dalam rentang waktu dari tahun 2021 – 2026 telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah dengan indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan target pada tahun 2024 adalah 51,35 %.
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan indikator Persentase Prestasi Olahraga dan target pada tahun 2024 adalah 74 %.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar didukung dengan 4 (empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.

Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dimaksudkan untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.
3. Menjadi acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas Perencanaan Program / Kegiatan diantara Bidang dan Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kota Blitar. Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan gambaran mendatang tentang cita dan citra atau keadaan masa mendatang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Misi Kota Blitar yang menyatakan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah Misi yang ke 2, yaitu : **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**

Dalam mewujudkan misi tersebut, maka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah sebagai berikut :

TUJUAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2024
1.	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Tingkat partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yg ikut dalam Organisasi Kepemudaan}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100 \%$	51,35%
		Persentase Prestasi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Atlit yg Berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit Delegasi}} \times 100 \%$	74%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD		A (84,21)

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah “*Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah*” dimana tujuan tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih dan RPJMD Kota Blitar. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar untuk Tahun 2024 dan terus menjadi cita-cita Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar untuk 1 tahun kedepan dikarenakan hal tesebut telah tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah dengan meningkatkan kualitas Organisasi Kepemudaan dan meningkatkan kegiatan Organisasi Olahraga di masyarakat.

Dalam tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yaitu *Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah*, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar mempunyai strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang dimaksud dengan menuangkan dalam sasaran-sasaran guna pencapaian tujuan.

Sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Dinas tertuang dalam indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Untuk lebih jelas dapat dilihat di *Tabel 3.2* berikut :

TABEL 3.2
SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	51,35%
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Prestasi Olahraga	74%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A (84,21)



3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 merupakan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan, tindaklanjut LKJIP, telaah kebijakan nasional dan sebagainya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024 sesuai Tabel 3.3.

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
		Persentase Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten / Kota dari	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
		Seluruh Kecamatan	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kelompok / Organisasi Pramuka yang dibina	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
		Cakupan pelatih yang tersertifikasi	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
		Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi

BAB IV

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Blitar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam RENSTRA Dinas Tahun 2021-2026 dan sudah dibahas di BAB sebelumnya. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut dibutuhkan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas yaitu Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan Ketrampilan dan Keahlian Pemuda dan Atlit.

Dari strategi dan kebijakan yang ada, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat mendukung langsung pencapaian sasaran dan tujuan Dinas. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana kerja berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024, sebagai penjabaran prioritas RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026.

Dalam menjalankan rencana program dan kegiatan, Perangkat Daerah diberikan pagu indikatif program. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD). Rencana Kerja berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan seluruh Perangkat Daerah sebagai instrumen pelaksana dari Program Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah Percepatan pencapaian Visi dan Misi Walikota Blitar sebagaimana tema pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026.

Dari Strategi dan Kebijakan yang ada, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan menguraikan dalam 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 13.521.035.150,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah

) dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Blitar dengan uraian sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupatean / Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda
 - Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa diskriminatif,

- partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan
- Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota
- III. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Keolahragaan (Sport Science)
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Sub Kegiatan Pemberian Perhargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
- IV. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
 - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana *Tabel 4.1* berikut :

Tabel. 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA BLITAR

NAMA OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82 Indeks	5.005.435.250				83 Indeks	5.760.000.000	
2.19.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart		100%	37.782.000				100%	38.000.000	
2.19.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	11 Dokumen	1.000.000	DAU		Kota Blitar	11 Dokumen	1.500.000	DAU
2.19.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	8 Dokumen	36.782.000	DAU		Kota Blitar	8 Dokumen	36.500.000	DAU
2.19.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart		100%	2.824.092.615				100%	2.904.000.000	
2.19.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	22 orang	2.823.092.615	DAU		Kota Blitar	22 orang	2.900.000.000	DAU
2.19.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Blitar	5 laporan	1.000.000	DAU		Kota Blitar	5 laporan	4.000.000	DAU

2.19.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart		100%	70.031.600				100%	125.000.000	
2.19.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar	2 Paket	20.000.000	DAU		Kota Blitar	5 Paket	55.000.000	DAU
2.19.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Blitar	22 orang	50.031.600	DAU		Kota Blitar	22 orang	70.000.000	DAU
2.19.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart		100%	414.284.800				100%	463.000.000	
2.19.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Blitar	1 paket	5.747.000	DAU		Kota Blitar	1 paket	9.000.000	DAU
2.19.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Blitar	4 paket	27.503.100	DAU		Kota Blitar	4 paket	105.000.000	DAU
2.19.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kota Blitar	5 paket	57.501.500	DAU		Kota Blitar	5 paket	24.000.000	DAU
2.19.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Blitar	8 paket	50.742.000	DAU		Kota Blitar	8 paket	85.000.000	DAU
2.19.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	1 paket	25.016.200	DAU		Kota Blitar	1 paket	44.000.000	DAU
2.19.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Blitar	12 dokumen	2.700.000	DAU		Kota Blitar	24 dokumen	6.000.000	DAU
2.19.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Blitar	24 laporan	245.075.000	DAU		Kota Blitar	24 laporan	190.000.000	DAU
2.19.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100%	27.293.400				100%	230.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket meubel yang disediakan	-	-	-	-		Kota Blitar	2 unit	55.000.000	DAU
2.19.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kota Blitar	6 unit	27.293.400	DAU		Kota Blitar	5 unit	125.000.000	DAU

	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-		Kota Blitar	1 unit	50.000.000	DAU
2.19.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart		100%	1.535.599.135				100%	1.715.000.000	
2.19.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Blitar	36 laporan	31.450.135	DAU		Kota Blitar	48 laporan	65.000.000	DAU
2.19.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Blitar	60 laporan	1.504.149.000	DAU		Kota Blitar	60 laporan	1.650.000.000	DAU
2.19.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart		100%	96.351.700				100%	285.000.000	
2.19.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Blitar	10 unit	78.580.700	DAU		Kota Blitar	10 unit	130.000.000	DAU
2.19.01.2.09.06	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Blitar	45 unit	17.771.000	DAU		Kota Blitar	49 unit	35.000.000	DAU
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	-	-	-	-		Kota Blitar	1 obyek	100.000.000	DAU
	Sub Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	-	-	-	-		Kota Blitar	1 obyek	20.000.000	DAU
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif		83%	806.829.865				83%	1.365.000.000	
		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		6,58%					6,88%		

2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda		1356 orang	1.167.144.400				1625 orang	565.000.000	
2.19.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kota Blitar	50 orang	18.917.200	DAU		Kota Blitar	150 orang	98.000.000	DAU
2.19.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kota Blitar	156 orang	977.361.600	DAU		Kota Blitar	120 orang	22.000.000	DAU
2.19.02.2.01.08	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan	Kota Blitar	1140 orang	251.342.159	DAU		Kota Blitar	1275 orang	365.000.000	DAU
2.19.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan		80%	261.522.800				80%	80.000.000	
2.19.02.2.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kota Blitar	2 dokumen	261.522.800	DAU		Kota Blitar	1 dokumen	80.000.000	DAU
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda		41%	6.688.601.200				42 %	15.075.000.000	
		Cakupan pelatih yang tersertifikasi		70%					70 %		
		Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar		70%					73 %		
2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan		21 Cabor	447.620.100				22 Cabor	5.310.000.000	

2.19.03.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kota Blitar	7 obyek	447.620.100	DAU		Kota Blitar	10 obyek	5.310.000.000	DAU
2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3 kejuaraan	548.380.400				4 kejuaraan	615.000.000	
2.19.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	Kota Blitar	2 dokumen	247.079.400	DAU		Kota Blitar	2 dokumen	365.000.000	DAU
2.19.03.2.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Blitar	90 orang	301.301.000	DAU		Kota Blitar	100 orang	250.000.000	DAU
2.19.03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		1 jenis	25.934.600				3 jenis	110.000.000	
2.19.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Blitar	1 Pelatda	25.934.600	DAU		Kota Blitar	3 Pelatda	110.000.000	DAU
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina		100%	5.262.768.600				100%	8.320.000.000	
2.19.03.2.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kota Blitar	3 dokumen	5.175.000.000	DAU		Kota Blitar	3 dokumen	8.200.000.000	DAU
2.19.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Kota Blitar	3 organisasi	87.768.600	DAU		Kota Blitar	3 organisasi	120.000.000	DAU
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi		50%	403.897.500				50%	720.000.000	
2.19.03.2.05.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Blitar	3 dokumen	403.897.500	DAU		Kota Blitar	4 dokumen	720.000.000	DAU
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif		73%	398.331.500				73 %	800.000.000	
2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina		73%	398.331.500				73 %	800.000.000	
2.19.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan	Jumlah SDM Kepramukaan	Kota	50 orang	48.331.500	DAU		Kota	200 orang	50.000.000	DAU

	Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Blitar					Blitar			
2.19.04.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar	1 lembaga	350.000.000	DAU		Kota Blitar	1 lembaga	550.000.000	DAU
2.19.04.2.01.07	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Kota Blitar	1 jenis	150.146.000	DAU		Kota Blitar	2 jenis	200.000.000	DAU
	J U M L A H				13.521.035.150	J U M L A H				23.000.000.000	



Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dispora Kota Blitar Tahun 2022
pada Renja Dispora Kota Blitar Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Mengoptimalkan keberadaan pemuda sebagai generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan sangat diperlukan yaitu Pemuda yang Berkarakter, Maju dan Mandiri.	• Verivikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI • Penguatan kelembagaan komunitas • Penguatan Peran KNPI	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. • Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota
2.	Mengoptimalkan Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal.	• Melakukan Pendampingan Konsultan Olahraga, Puslatkot dan Latihan Tanding • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah • Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas • Melakukan Sosialisasi secara masif • Memberikan reward kepada atlit yang berprestasi	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Kegiatan Pembinaan dan Pengembagnan Olahraga Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah kab/Kota • Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar difokuskan pada :

1. Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sehingga tingkat keaktifannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
2. Menciptakan inovasi kegiatan yang lebih menyentuh kepada kepeloporan pemuda.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur olahraga termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur olahraga khusus difabel untuk mencetak atlit yang berprestasi.
4. Penyelenggaraan / pengiriman atlit untuk mengikuti kompetisi olahraga usia sekolah sebagai sarana mencetak / mempersiapkan atlit yang handal.



BAB V

PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024, penyelenggaraan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:

5.1 Catatan Penting

1. Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan.
2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 ini mengacu pada Rancangan Awal RKP Tahun 2024, rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, serta hasil Pemetaan Kepmen No. 050/5889/2021.
2. Seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2024 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat.
6. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2024 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap RKPD juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap RKPD ini.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini, diharapkan seluruh Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicitakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.
4. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dapat terwujud jika seluruh Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat pmenjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024.

